



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2022



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI
2021



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan Tahunan Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Semesta Berencana.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

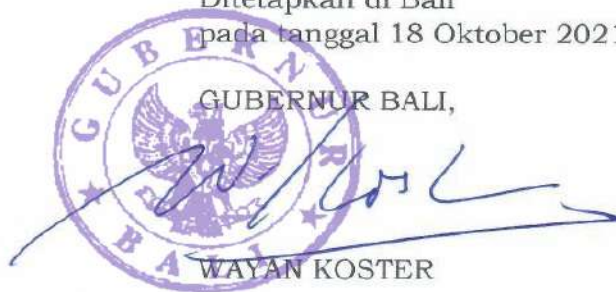
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

GOVERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Diagram	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	42
Bab V Penutup.....	43
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
- Tabel 2.3. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-jabatan Struktural
- Tabel 2.4. Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
- Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019
- Tabel 2.7. Target belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran
- Tabel 2.9. Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran
- Tabel 2.10. Pengukuran Kinerja
- Tabel 2.11. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel
- Tabel 2.12. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Wirausaha dari Pelaku UMKM yang Tangguh dan Mandiri
- Tabel 2.13. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020
- Tabel 2.14. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020
- Tabel 2.15. Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Bali
- Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun dengan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan terciptanya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM, dan RPKD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPKD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Provinsi Bali khususnya dan nasional pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah melalui tahapan mulai dari penyusunan Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir Renja dan selanjutnya ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2021. Penyusunan Renja ini juga berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Sebelum ditetapkan Renja harus melalui tahapan sebagai berikut:

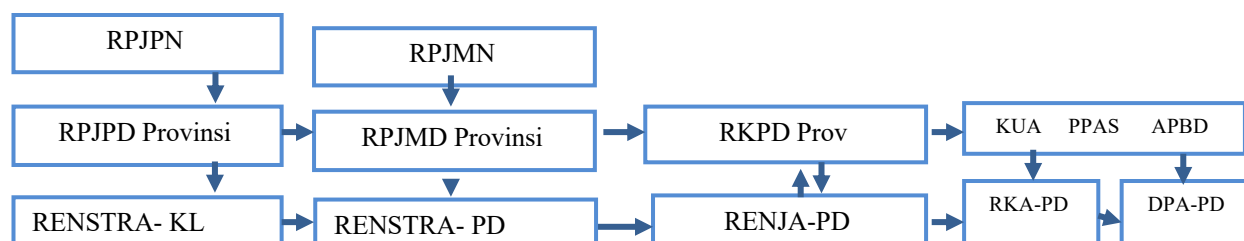
- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memiliki rincian tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi serta penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 25) Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 43);
- 26) Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- 27) Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Bali Tahun 2022 sesuai pasal 105 ayat (1) point (a) menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya Rancangan Akhir akan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan :

- 1) Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2022;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pembangunan daerah;
- 3) Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2022;
- 2) Merancang program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022;
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Renstra Semesta Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**, memuat telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,** memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,** pada bagian ini tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan,** pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 melaksanakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
 - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun per Juni 2021, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	18
3	Strata 1	42
4	Diploma III	2
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	11
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	1
Total		74

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 18 (delapan belas) orang, Strata 1 sebanyak 42 (empat puluh dua) orang,

Diploma III sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 11 (sebelas) orang, SD sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	50
3	Golongan II	5
4	Golongan I	3
Total		74

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel 2.2 jumlah pegawai berdasarkan golongan yaitu Golongan IV sebanyak 16 (enam belas orang), Golongan III sebanyak 50 (lima puluh) orang, Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, Golongan I sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
JABATAN STRUKTURAL		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
JABATAN FUNGSIONAL		
1	Arsiparis	1
2	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1
Total		27

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel 2.3 jumlah pegawai berdasarkan jabatan yaitu jabatan struktural dan fungsional. Untuk jabatan struktural terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 6 (enam) orang, Eselon IV sebanyak 18 (delapan belas) orang. Jabatan fungsional terdiri

dari 1 (satu) orang Arsiparis dan 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Administrasi	41
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga Malam	9
5.	Satpam (Pihak Ketiga)	-
6.	Cleaning Service dan Tukang Kebun (Pihak Ketiga)	11
Total		69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah pegawai Non PNS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang.

Tabel 2.5
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1066 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	3 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	7 unit
5	Meja Kerja	92 buah
6	Kursi Kerja	84 buah
7	Komputer	30 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Rak kaca/kayu	23 unit
11	Lemari besi/Kayu	22 unit
12	AC	50 unit
13	Zise	7 Unit
14	Kursi Tamu	15 unit
15	Alat Kantor lainnya	1 unit

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2021)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2018-2023 dengan Visi : **“NANGUN SAT**

KERTHI LOKA BALI ” Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru dengan mengemban 1(satu) misi yaitu : Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali (Misi 17)

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada misi tersebut dengan tujuan terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali dan berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi lokal serta meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama Bali untuk mencapai tujuan adanya Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali dengan strategi melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang melaksanakan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Tujuan pada Renstra yaitu Meningkatkan Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan sasaran terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel dan Meningkatkan Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Bali, dalam Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Bali. Sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan (sesuai pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) melaksanakan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan seperti berikut:

Tabel 2.7.
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.414.656.786,00	2.380.350,00	95,45	Nilai LKjIP	82,50	100	100	100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000,00	630.000,00	100,00	Jumlah materai yang disediakan	lembar	125	125	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.531.179,00	163.474.789,00	90,05	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	jenis	3	3	100,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.935.700,00	30.935.700,00	100,00	Jumlah jenis alat tulis kantor	jenis	39	39	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.144.825,00	1.144.825,00	100,00	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	jenis	3	3	100,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.828.600,00	6.828.600,00	100,00	Jumlah jenis instalasi listrik	jenis	8	8	100,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.860.000,00	21.855.000,00	99,98	Jumlah jenis bahan bacaan	jenis	7	7	100,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.450.000,00	5.450.000,00	100,00	Jumlah jenis makanan dan minuman	jenis	1	1	100,00
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Jumlah jenis perjalanan dinas	jenis	2	2	100,00
9	Upacara Keagamaan	92.659.944,00	86.659.000,00	96,52	Jumlah jenis upacara keagamaan	jenis	6	6	100,00
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	615.037.832,00	612.005.362,00	99,51	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	jenis	6	6	100,00
11	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.490.000,00	5.490.000,00	100,00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan kantor	2	2	100,00

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	713.675.432,00	710.642.962,00	99,58	Jumlahn jenis pemeliharaan gedung kanor	jenis	1	1	100,00
13	Pemeliharaan ruti/berkala Kendaraan Dinas	543.474.423,00	539.728.398,00	99,31	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	jenis	10 roda 4/8 roda 2	10 roda 4/8 roda 2	100,00
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	99.356.400,00	99.356.400,00	100,00	Jumlah gedung kantor yang direhab	paket	2	2	100,00
15	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	94.182.451,00	93.749.241,00	99,54	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	100,00
II	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	201.440.514,00	200.748.399,00	96,74	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	unit	210	210	100,00
16	Penilaian Kesehatan Koperasi	80.726.688,00	80.510.083,00	99,73	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	KSP/USP koperasit	100	26	26
17	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	70.172.288,00	69.913.483,00	99,63	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	koperasi	26	26	100,00
18	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	50.541.538,00	50.324.833,00	99,57	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	koperasit	8	8	100,00
III	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	307.170.243,00	305.036.908,00	96,49	Jumlah Koperasi yang Bankable	unit	58	58	100,00
19	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	45.049.915,00	44.833.310,00	99,52	Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	koperasi	30	20	66,67
20	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi	212.819.840,00	211.119.715,00	99,20	Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	32	32	100,00
21	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	49.300.488,00	49.083.883,00	99,56	Jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik	koperasi	15	15	100,00
IV	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	5.944.900,00	5.494.900,00	100,00	Jumlah subak sebagai Koperasi Tani	Subak	1	1	100,00

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Pengembangan Koperasi Subak	5.944.900,00	5.944.400,00	99,99	Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	subak	8	8	100,00
V	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	145.474.364,00	144.824.549,00	90,42	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	unit	104	104	100,00
23	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	56.807.688,00	56.591.083,00	99,62	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	koperasi	50	50	100,00
24	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	47.976.438,00	47.759.833,00	99,55	Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan	koperasi	50	37	74,00
25	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	40.690.238,00	40.473.633,00	99,47	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	koperasi	4	-	-
VI	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	6.826.500,00	6.826.500,00		Jumlah koperasi tenun yang aktif	Koperasi	1	1	100,00
26	Pemberdayaan Koperasi Tenun	6.826.500,00	6.826.500,00	100,00	Jumlah peserta yang bimtek tenun	Orang	30	-	-
VII	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	505.665.830,00	501.750.060,00	96,78	Jumlah UMKM yang Bankable	UMKM	50	50	100,00
27	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	308.969.554,00	307.236.714,00	99,44	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	UMKM	50	-	-
28	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	159.066.288,00	157.099.983,00	98,76	Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	UMKM	89	136	152,81
29	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	37.629.988,00	37.413.383,00	99,42	Jumlah UKM yang memperoleh ijin usaha	UMKM	25	23	92,00
VIII	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	4.156.855.583,00	3.766.889.434,00	95,67	Jumlah Pengelola KUMKM yang Kompeten dan Bersertifikat	KUKM	50	50	100,00
30	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	89.402.676,00	88.969.463,00	99,52	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	KUKM	25	-	-

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Penyediaan jasa surat menyurat	822.000,00	822.000,00	100,00	Jumlah materai	lembar	80	80	100,00
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.578.900,00	16.917.151,00	78,40	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	Jenis	3	3	100,00
33	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.443.000,00	3.443.000,00	100,00	Jumlah jenis ATK	Jenis	21	21	100,00
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	499.950,00	499.950,00	100,00	Jumlah lembar foto copy	lembar	2.222	2.222	100,00
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.076.600,00	1.076.600,00	100,00	Jumlah jenis instalasi listrik	Jenis	12	12	100,00
36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000,00	840.000,00	100,00	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis	1	1	100,00
37	Penyediaan Makanan dan Minuman	525.000,00	525.000,00	100,00	Jumlah jenis makanan dan minuman	Jenis	2	2	100,00
38	Upacara Keagamaan	58.000.000,00	57.700.000,00	99,48	Jumlah jenis upacara keagamaan	Jenis	6	6	100,00
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	228.222.128,00	226.922.492,00	99,43	Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan	Jenis	3	3	100,00
40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	65.889.119,00	63.748.883,00	96,75	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Jenis	2	2	100,00
41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	4	4	100,00
42	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	3.003.950,00	3.003.950,00	100,00	Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	Dokumen	1	1	100,00
43	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.600.000.000,00	3.218.868.685,00	89,41	Jumlah pengurus dan pengelola KUKM yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	1.091	1.110	101,74
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Knator	79.812.260,00	79.812.260,00	100,00	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	Unit	1	1	100,00
	JUMLAH PROGRAM : 8								
	JUMLAH KEGIATAN : 44	7.744.034.720,00	7.312.370.547,00	95,62					

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2020 (dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2.7) adalah :

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 8 (delapan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) program dan 37(tiga puluh tujuh) kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- h) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
- i) Kegiatan Upacara Keagamaan
- j) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- k) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- m) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- n) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- o) Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja

2. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi

- a) Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi

Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah pelaku KUMKM dalam mengakses permodalan tersebut memanfaatkan program yang diluncurkan Pemerintah Pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemanfaatan KUR tersebut oleh KUMKM karena mendapat informasi secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan proposal usaha. Dukungan capaian indikator kinerja tersebut melalui pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

3. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi

- a) Kegiatan Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi
- b) Kegiatan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
- b) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi
- c) Kegiatan Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi

5. Program Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani

- a) Kegiatan Pengembangan Koperasi Subak

6. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Menengah

7. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- a. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- g) Kegiatan Upacara Keagamaan
- h) Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- i) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- j) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- k) Kegiatan Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM
- l) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- m) Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

b. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- 1. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
 - a) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi
- 2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
 - a) Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
- 3. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
 - a) Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
 - b) Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi
- 4. Program Pengembangan Koperasi Tenun
 - a) Pemberdayaan Koperasi Tenun

5. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - a) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - b) Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM
 - a) Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan 8 (delapan) program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp 7.744.034.720,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Realisasi dana Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp 7.312.370.547,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 94,43% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,49%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2020, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan

dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.19.139.555.866,00. Dengan rincian : Belanja Tidak Langsung Rp. 11.391.921.146,00 dan Belanja Langsung Rp. 7.744.034.720,00 Prioritas utama Pemerintah pada tahun 2020 adalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19.

Tabel 2.9
Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2020
Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran

No	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi Anggaran Tahun 2020	28.134.105.008,29	19.135.955.866,00
2	Belanja Langsung	19.139.144.742,00	7.744.034.720,00
3	Belanja Tidak Langsung	8.994.960.266,29	11.391.921.146,00

Tabel 2.10
Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 Sebelum dan
Sesudah Refocusing Anggaran

NO	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
1	Peningkatan Pengawasan Koperasi	569.153.976	201.440.514
2	Penguatan Kelembagaan Koperasi	567.380.944	307.170.243
3	Pengembangan Subak Sebagai Koperasi Tani	50.086.000	5.944.900
4	Pengembangan dan Penciptaan iklim usaha Koperasi	375.340.376	145.474.364
5	Pengembangan Koperasi Pengerajin tenun	70.670.000	6.826.500

6	Penciptaan iklim usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah	769.340.809	505.665.830
7	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	4.048.488.247 (- DAK)	4.156.855.583 (+ DAK)
8	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	8.701.573.527	2.414.656.786
	Total	15.152.033.879	7.744.034.720

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, Fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mmencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good Governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

b. Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.11. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Berjalan			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase koperasi yang aktif dan RAT	%	88,85%	79,85%	90,59%	Sangat baik
	2 Persentase peningkatan produktivitas koperasi	%	5,70%	8,35%	146,49%	Sangat Baik
	3 Jumlah Koperasi yang Bankable	Unit	58	58	100%	Sangat Baik
2 Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Jumlah UMKM yang Bankable	%	180	180	100%	Sangat Baik
	2 Jumlah Peningkatan Kelas Usaha UMKM	Unit	89	89	100%	Sangat Baik
	3 Jumlah Penumbuhan Wirausaha baru	Unit	50	180	360%	Sangat Baik

1. Sasaran

- a. Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Professional dan Akuntabel

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020				Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase koperasi yang aktif	78,98%	88,18 %	79,89%	90,59%	-	-
	2 Persentase peningkatan produktivitas	8,15%	5,70%	8,35%	146,49%	-	-
	3 Jumlah Koperasi yang Bankable	-	58	58	100%	322	18,01%

Indikator Prosentase Koperasi yang aktif yaitu bertambahnya komposisi koperasi aktif dari total koperasi. Realisasi sasaran strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2020 “Prosentase Koperasi yang aktif” adalah 79,89 % dari target sebesar 88,18 % dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 90,59 %. Dalam perhitungan indikator “Prosentase Koperasi yang Aktif” perhitungan yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Jml Koperasi yang RAT}}{\text{Total Jumlah Koperasi}} \times 100\%$$

Tabel 2.13.

Analisi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Jumlah UMKM yang Bankable	-	180 UMKM	180 UMKM	100%	919 UMKM	19,59%
		2. Jumlah Peningkatan Kelas Usaha UMKM	-	89 UMKM	89 UMKM	100%	-	-
		3. Jumlah Penumbuhan Wirausaha baru	-	50 UMKM	50 UMKM	100%	-	-

Sasaran Meningkatkan wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dapat dilihat dari indikator **“Jumlah UMKM yang Bankable”** dengan capaian indikator sebanyak 180 UMKM dari Target 180 UMKM, keberhasilan pemenuhan target tersebut tak lepas dari kegiatan :

1. Memfasilitasi Pengusulan Bantuan PBSU dalam pemulihan ekonomi akibat terdampak Covid -19. Bagi sektor pelaku usaha (UMKM) dan pekerjaharian
2. Memfasilitasi Pengusulan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi Pelaku usaha Mikro dalam upaya pemulihan ekonomi akibat Dampak Covid -19 (dari anggaran pusat Kemenkop).
3. Memfasilitasi penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK) secara online dengan total 432 IUMK, dengan Bidang Usaha Fashion 21, Jasa 54, Kerajinan 15, Kuliner 243, Perdagangan 84, Pertanian 3, Peternakan 2, dan Industri 10.

Realisasi Indikator **“Jumlah Peningkatan Kelas Usaha UMKM”** pada tahun 2020 adalah 89 UMKM dari Target sebanyak 89 UMKM dengan persentase pencapaian sasaran sebesar 100%. Peningkatan kelas UMKM merupakan jumlah UMKM yang meningkat modal, produksi,

jumlah tenaga kerja serta omset/assetnya. Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan kelas usaha UMKM adalah :

1. Bersinergi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam memfasilitasi UMKM dalam pelaksanaan Pasar GotongRoyong
2. Memfasilitasi Pengusulan HKI sebanyak 28 Usulan

Realisasi indikator “**Jumlah Penumbuhan Wirausaha Baru**” pada tahun 2020 adalah 50 UMKM dari Target 50 UMKM dengan persentase pencapaian sasaran sebesar 100%. Keberhasilan tersebut berkat kegiatan Pendampingan yang dilakukan oleh Konsultan Pendamping PLUT- KUMKM dalam memfasilitasi UMKM dengan bekerjasama dengan GOJEK (UmkM Go Digital) dan GRAB (Kiat sukses memulai Bisnis di MarketPlace), sehingga banyak masyarakat yang tertarik membuka usaha dan bermitra langsung dengan GOJEK sehingga memudahkan pemasaran produk. Faktor pendukung lainnya adalah pada masa pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaannya sehingga mereka banyak beralih profesi membuka usaha. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tersebut antara lain :

- a. Bimtek dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi dan masa pandemik
- b. Pemasaran Produk dan kemitraan tidak bisa dilaksanakan melalui pameran diluar dan dalam daerah
- c. Fasilitasi Perijinan dengan penjajagan ke Kabupaten tidak bisa dilaksanakan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah :

- a. penumbuhan UMKM dilaksanakan dengan upaya memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan gojek atau dengan start-up lainnya.
- b. melakukan kemitraan dan pameran didalam negeri dengan pasar gotong royong yang melibatkan UMKM sebagai peserta

- c. Memanfaatkan OSS UMKM untuk memfasilitasi mendaftarkan dan mendapatkan ijin IUMK

2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali DPPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.744.034.720,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.312.370.547,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,43%.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat tinggi ataupun sangat tinggi, kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik. Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	4.823.712.104	4.432.187.690	91,88
2	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	505.665.830	501.750.080	99,23
3	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.414.656.786	2.380.350.277	98,58
JUMLAH		7.928.485.107	7.312.370.547	94,43

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas KOPERASI dan UKM
Provinsi Bali Tahun 2020

No.	Kategori Skala Nilai	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A.	Sasaran 1	3	112,36 %	4.432.187.690	91,88
1	Tidak Ada Target	-			
2	Tidak Tercapai	1			
3	Mencapai Target	1			
4	Melebihi Target	1			
B.	Sasaran 2	3	100%	501.750.080	99,23
1	Tidak Ada Target	-			
2	Tidak Tercapai	-			
3	Mencapai Target	3			
4	Melebihi Target	-			

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2020 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua periode Renstra 2018-2023. Secara umum anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan sangatlah kurang mengingat refocusing anggaran yang telah dilaksanakan demi percepatan penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang tersisa hanya digunakan untuk membayar tenaga honorer (Non ASN).

Namun dalam pemenuhan capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, berusaha maksimal dengan menggunakan anggaran yang tersisa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga capaian dari sasaran strategis dapat dipenuhi dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan, akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi.

b. Pengembangan KUKM

Dilaksanakan secara bertahap dan terukur melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional.

c. Re-Orientasi KUKM

Mengubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas kelembagaan koperasi

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :

1. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM di Bali.
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM.
4. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.
5. Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.

Adapun Isu-isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
- b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan

- c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha
- d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
 - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi
 - Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan KUKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM.
 - Meningkatkan dalam memfasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :
 - Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
 - Terbatasnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses permodalan/pembiayaan, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran.
 - Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.
 - Rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi para pelaku UKM. Sebagian besar UKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.

- Rendahnya pertumbuhan usaha dan daya saing UMKM.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2019 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :
- Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdampak langsung kepada Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya yaitu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Kredit Bali Mandara.
 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mendorong pembentukan koperasi sektor riil.
 - Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi dengan tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor koperasi dan UMKM.
 - Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan program ini telah terwujudnya kemitraan KUKM serta SDM pengelola Koperasi yang berkualitas.
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :
- Koperasi dan UKM dapat disebut sebagai gambaran pondasi dasar ekonomi bangsa Indonesia karena mempunyai dasar azas kekeluargaan, akan tetapi kondisi saat ini tidak mudah menjalankan kegiatan perkoperasian di Indonesia. Lingkungan dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini yang kemudian dapat

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu analisis internal dan analisis eksternal.

a. Analisis Internal

- **Kekuatan (*strength*)**

- Adanya Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian dan UKM.
- Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi menunjukkan bahwa koperasi memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

- **Kelemahan (*Weakness*)**

- Kualitas SDM pengelola koperasi masih rendah.
- Akses permodalan Koperasi dan UKM masih kurang.
- Pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM terbatas.
- Masih tingginya orientasi pendirian Koperasi Simpan Pinjam

b. Analisis Eksternal

- **Peluang (*Oppurtunity*)**

- Adanya pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM.
- Adanya fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/pembiayaan.
- Adanya fasilitasi pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi.

- **Ancaman (*Treath*)**

- Adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif.
- Adanya gangguan dari para tengkulak.

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
- Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.

- Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang akan menjadi dokumen perencanaan tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dan memastikan program, kegiatan, serta sub kegiatan telah ada dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2022. Berikut adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 (Tabel 2.8.).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2021, ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.16.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (Koperasi dan UKM)	Denpasar	Database Koperasi dan UKM	-	Menyiapkan website/aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas mengenai Koperasi dan UKM
2.	Grand Desain Ekosistem Pengembangan Koperasi dan UKM	Denpasar	Koperasi dan UKM Naik Kelas dan Modern	-	Menyiapkan Koperasi dan UKM yang modern, kompetitif dan berorientasi ekspor

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2018 berakhir masa berlakunya RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, oleh karena itu penyusunan tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 Selanjutnya Bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Nasional periode 2020-2024 Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM RI periode 2020-2024 sebagai berikut:

Visi : “Terwujudkan Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi : Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing):

Tujuan :

- Modernisasi Koperasi
- Melahirkan entrepreneur baru
- Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain* (GVC)
- *Scaling Up* UMKM

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara

prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjawab dengan program unggulan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM menuju digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel

Indikator : 1. Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi

2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Indikator : Rasio Kewirausahaan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
a.	Penyediaan jasa surat menyurat
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
a.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a.	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

C.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1.	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
D.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha
b.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha
E.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
a.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
F.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
a.	Penyediaan jasa surat menyurat
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
4.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
G.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	JUMLAH PROGRAM : 7
	JUMLAH KEGIATAN : 15
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 30

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 berjumlah 7 (tujuh) dengan kegiatan berjumlah 15 (lima belas), dan sub kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2022 seperti terlampir dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp18.546.844.439,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian pagu indikatif untuk **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali** sebesar Rp16.821.780.062,00 (Enam belas milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah); **UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** sebesar Rp5.619.828.137,00 (Lima milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu yang telah ditetapkan pada tahap penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak mendapat alokasi pendanaan akan diadakan penyesuaian terhadap target yang pada saat penyusunan berdasarkan pagu indikatif tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah melaksanakan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta stakeholder (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.
 - d. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 dengan beberapa perubahan antara lain :
- a. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 6 (enam) program, 14 (lempat belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan untuk Dinas dan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan untuk UPTD, dan setelah dilakukan penyederhanaan kegiatan pada Sekretariat melalui Program Akuntabilitas Capaian Kinerja yang sebelumnya terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-				Urusan Pilihan									
-	01			Koperasi dan UKM									
				Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	118 Koperasi		210 unit	210 unit	100%			
				Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	100 KSP/USP Koperasi	64 unit	135 unit	135 unit	100%			
				Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	52 Koperasi		50 unit	50 unit	100%			
				Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	8 Koperasi	9 unit	25 unit	25 unit	100%			
				Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Bankable	58 koperasi		50 unit	50 unit	100%			
				Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang dimutakhirkan		45 unit	20 unit	20 unit	100%			
				Penumbuhan dan	Jumlah Petugas PPKL	32 orang		17 unit	17 unit	100%			

				Pengembangan Koperasi	yang mendapat Peningkatan Kapasitas								
				Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15 koperasi	15 unit	15 unit	15 unit	100%			
				Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1 subak							
				Pengembangan Koperasi Subak	Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	1 subak							
				Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	104 koperasi		104 unit	104 unit	100%			
				Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	50 koperasi	50 unit	50 unit	50 unit	100%			
				Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan	50 koperasi	50 unit	50 unit	50 unit	100%			
				Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	4 koperasi		4 unit	4 unit	100%			
				Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1 koperasi							
				Pemberdayaan Koperasi Tenun	Jumlah peserta yang bimtek tenun	30 orang							
				Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	180 UMKM		204 UMKM	204 UMKM	100%			
				Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	70 unit	50 UMKM	50 UMKM	100%			
				Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	89 UMKM	40 unit	104 UMKM	104 UMKM	100%			
				Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	25 UMKM		25 UMKM	25 UMKM	100%			
				Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan	-	30 unit	25 UMKM	25 UMKM	100%			

				Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	Jumlah SDM KUKM yang berkompeten	50 orang		50 KUKM	50 KUKM	100%	50 orang		
				Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	25 UMKM		50 KUKM	50 KUKM	100%	50 orang		
				Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus dan pengelola KUKM yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	1091 orang		1.470 orang	1.470 orang	100%	990 orang		

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,5	15.381.344.509,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	83,5 Persen	15.302.587.195,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	170.541.596,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 dokumen	80.630.016,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	148.163.346,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	78.417.006,00	
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Denpasar	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.184.320,00						
c.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Denpasar	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	4.184.320,00						
d.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen capaian kinerja	1 dokumen	14.009.610,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan,	Jumlah dokumen	1 dokumen	2.213.010,00	

			perangkat daerah				semua kelurahan	capaian kinerja perangkat daerah			
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	12.340.296.683,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	12.830.645.181,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	12.340.296.683,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	12.830.645.181,00	
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	338.270.650,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik	6 layanan	96.895.770,00	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	17.066.450,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	9.999.250,00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	90.781.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	64.931.520,00	

c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	24.196.600,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	14.965.000,00	
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	7.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	7.000.000,00	
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	6.630.000,00						
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	192.596.000,00						
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	174.917.000,00						
a.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	1 paket	174.917.000,00						
5.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,5	1.297.634.752,00	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 layanan	1.335.111.200,00	

a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 layanan	2.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 layanan	2.000.000,00	
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 Layanan	271.200.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 Layanan	271.200.000,00	
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1.024.434.752,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1.061.911.200,00	
6	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,5	1.059.683.808,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 jenis	959.305.028,00	
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Denpasar	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	781.939.736,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	729.460.536,00	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Jumlah Jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 jenis	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 jenis	50.000.000,00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	227.744.092,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	179.844.492,00	
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Denpasar	Jumlah Koperasi yang bankable	71 Koperasi	695.649.700,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang bankable	83,33 persen	266.464.240,00	

1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang bankable	71 Koperasi	347.824.860,00	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	71 Koperasi	22.516.000,00	
a.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	71 koperasi	347.824.860,00	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	71 koperasi	22.516.000,00	
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang bankable	71 Koperasi	347.824.840,00	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah izin usaha pembukaan kantor cabang yang diterbitkan	5 Koperasi	243.948.240,00	

a.	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	5 koperasi	347.824.840,00	Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	5 koperasi	243.948.240,00	
C.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	142 koperasi	274.599.806,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	66,98 persen	0	
1.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	142 koperasi	173.897.466,00	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi	90 koperasi	0	

a.	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat.	Karangasem, klungkung, tabanan, Denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah Koperasi yang bankable	33 koperasi	63.510.848,00	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat.	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi yang bankable	33 koperasi	0	
b.	<i>Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel</i>	Karangasem, klungkung, tabanan, Denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah Koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	57 koperasi	110.386.598,00	<i>Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel</i>	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab.	Jumlah Koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	57 koperasi	0	

							Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
2.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	142 koperasi	100.702.360,00	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang diperiksa dan diawasi	52 KSP/USP-Koperasi	0	
a.	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	Karangasem, klungkung, tabanan, denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	52 /KSP/USP Koperasi	100.702.360,00	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	52 /KSP/USP Koperasi umlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	0	

D.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	142 KSP/USP Koperasi	215.139.458,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78,89 persen	261.161.029,00	
1.	Kegiatam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	142 KSP/USP Koperasi	215.139.458,00	Kegiatam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	142 KSP/USP Koperasi	118.552.896,00	
a.	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Karangasem, klungkung, Tabanan, Denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	42 KSP/USP Koperasi	63.632.540,00	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Ka. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Badung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan dan semua kelurahan),	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	42 KSP/USP Koperasi	0	

							Kab. Buleleng (semua kecamatan dan semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan)				
b.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Karangasem, klungkung, Tabanan, Denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi NlvO Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	151.506.918,00	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah KSP/USP Koperasi NlvO Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	118.552.896,00	
E.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan Bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126 Koperasi	3.139.879.790,00	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi/koperasi tenun/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/ Swasta	126 Koperasi	394.224.080,00	
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan Bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126 Koperasi	3.139.879.790,00	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Badung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua	Jumlah Koperasi Nivo yang didampingi	126 Koperasi	394.224.080,00	

							kecamatan, semua kelurahan)				
a.	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Karangasem, klungkung, tabanan, denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang difasilitasi Permodalan jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang difasilitasi Temu Mitra	60 Koperasi	1.043.879.204,00	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Badung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang difasilitasi Permodalan jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang difasilitasi Temu Mitra	60 Koperasi	167.461.344,00	
b.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha	Karangasem, klungkung, tabanan, denpasar (semua kecamatan dan kelurahan)	Jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang Baik Kelembagaan dan Meningkatkan Aset dan Omsetnya Jumlah Koperasi Tenun yang Aktif Jumlah Subak sebagai Koperasi Tani	64 Koperasi 1 koperasi 1 Koperasi	2.096.000.586,00	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi NIVO Provinsi yang Baik Kelembagaan dan Meningkatkan Aset dan Omsetnya Jumlah Koperasi Tenun yang Aktif	64 Koperasi 1 koperasi 1 Koperasi	226.762.736,00	

							kelurahan)	Jumlah Subak sebagai Koperasi Tani			
F.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah UMKM yang Bankable	190 UMKM	1.784.674.800,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase UMKM yang Bankable	0,12 persen	614.763.900,00	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Badung, bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana (semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah UMKM yang Bankable	190 UMKM	1.784.674.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	190 UMKM	614.763.900,00	
a.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jembrana, Tabanan, Denpasar (Semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Peningkatan Kelas UMKM	190 UMKM	1.784.674.800,00	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Peningkatan Kelas UMKM	190 UMKM	614.763.900,00	
G.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	6.707.770.311,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 persen	1.775.299.232,00	

1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	2.204.255.930,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1.357.423.276,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	2.204.255.930,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	1.357.423.276,00	
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan Denpasar)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	470.823.580,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 layanan	4.416.220,00	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	3.760.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	689.500,00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	420.146.280,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	2.726.720,00	

c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	2.875.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1.000.000,00	
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1.000.000,00						
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	43.041.800,00						
3.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,5	290.939.792,00	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 layanan	239.452.392,00	
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 layanan	3.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 layanan	1.000.000,00	
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	1 Layanan	48.500.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan	1 Layanan	48.500.000,00	

								disampaikan tepat waktu.			
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	239.939.792,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	189.952.392,00	
4.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,5	3.741.751.009,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 jenis	95.784.448,00	
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	108.460.048,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	95.784.448,00	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 jenis	14.590.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Jenis peralatan mesin yang dipelihara	1 jenis	3.270.000,00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	3.618.700.961,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	74.952.896,00	
H.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Pengelola KUMKM yang Kompeten dan Bersertifikat	50 Orang	171.020.196,00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,25 persen	74.952.896,00	
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Peserta Diklat yang memperoleh Sertifikasi Teknis dan Sertifikat Kompeten	50 Orang	171.020.196,00	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	50 Orang	74.952.896,00	

						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	50 Orang	74.952.896,00	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	----------	---------------	--

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22,441,608,190	0	0	0	22,441,608,190	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17,145,548,968	0	0	0	17,145,548,968	
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,630,016	0	0	0	80,630,016	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78,417,006	0	0	0	78,417,006	
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,213,010	0	0	0	2,213,010	
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,255,730,998	0	0	0	14,255,730,998	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,898,307,722	0	0	0	12,898,307,722	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,357,423,276	0	0	0	1,357,423,276	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				101,311,990	0	0	0	101,311,990	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,999,250	0	0	0	9,999,250	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		689,5	0	0	0	689,5	
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,931,520	0	0	0	64,931,520	
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,726,720	0	0	0	2,726,720	
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,965,000	0	0	0	14,965,000	
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,000,000	0	0	0	1,000,000	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,000,000	0	0	0	7,000,000	
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,574,563,592	0	0	0	1,574,563,592	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,000,000	0	0	0	2,000,000	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		271,200,000	0	0	0	271,200,000	
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,500,000	0	0	0	48,500,000	
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,061,911,200	0	0	0	1,061,911,200	
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer	Kota Denpasar, Semua		189,952,392	0	0	0	189,952,392	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,133,312,372	0	0	0	1,133,312,372	
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		729,460,536	0	0	0	729,460,536	
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,784,448	0	0	0	95,784,448	
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,270,000	0	0	0	3,270,000	
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179,844,492	0	0	0	179,844,492	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,952,896	0	0	0	74,952,896	
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				255,064,240	0	0	0	255,064,240	
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17,956,000	0	0	0	17,956,000	
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,956,000	0	0	0	17,956,000	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	2	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				237,108,240	0	0	0	237,108,240	
2	17	2	1.02	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		237,108,240	0	0	0	237,108,240	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				118,552,896	0	0	0	118,552,896	
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				118,552,896	0	0	0	118,552,896	
2	17	4	1.01	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118,552,896	0	0	0	118,552,896	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				3,844,528,896	0	0	0	3,844,528,896	
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3,844,528,896	0	0	0	3,844,528,896	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,844,528,896	0	0	0	3,844,528,896	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				468,864,290	0	0	0	468,864,290	
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				468,864,290	0	0	0	468,864,290	
2	17	6	1.01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		315,246,554	0	0	0	315,246,554	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		153,617,736	0	0	0	153,617,736	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				609,048,900	0	0	0	609,048,900	
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				609,048,900	0	0	0	609,048,900	
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		609,048,900	0	0	0	609,048,900	

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							